



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.56120/PP/M.IXA/19/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Masuk
- Tahun Pajak : 2013
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pembebanan Tarif **Klasifikasi** Pos 1 dan 2 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, jenis barang berupa *Aluminium Wheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 134152 tanggal 09 April 2013 yaitu Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) sebesar 5%, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) sebesar 10%;
- Menurut Terbanding : bahwa atas jenis barang yang dipermasalahkan yaitu *Aluminium Wheel of Motorcycle* dst (2 (Dua) Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8714.10.9030 dan dikenakan tarif Bea Masuk 10% (MFN);

Menurut Pemohon : bahwa Jiangsu Zhonglian Aluminium Co., Ltd merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan velg aluminium, produksi dan penjualan mempunyai hubungan kerjasama dengan yang baik di dalam negeri dan domestik seperti Wuyang-Honda Motors Co., Ltd., Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd, dan perusahaan lainnya, dan juga dengan beberapa Perusahaan asing mempunyai hubungan bisnis yang baik, serta memiliki hasil penjualan yang baik;

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-4977/KPU.01/2013 tanggal 21 Agustus 2013, berdasarkan hasil identifikasi jenis barang, nilai impor, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa Pembebanan Tarif Bea Masuk atas *Aluminium Wheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, negara asal China, **Klasifikasi** Pos 1 dan 2 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 134152 tanggal 09 April 2013 ditetapkan menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (MFN) sebesar **10%**;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E133108100071259 tanggal 27 Maret 2013 didapatkan diragukan kebenarannya karena berdasarkan deskripsi produk pada kolom 7 Form E Nomor: E133108100071259 tanggal 27 Maret 2013 tersebut tidak terdapat dalam daftar produk yang termasuk dalam kriteria wholly obtained (WO), sehingga terhadap importasi tersebut tidak berhak atas fasilitas tarif bea masuk dalam rangka ASEAN - China Free Trade Agreement (AC-FTA) dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 10%;

bahwa menurut Pemohon Banding, importasi Pemohon Banding atas jenis barang *Aluminium Wheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 134152 tanggal 09 April 2013, **Klasifikasi** Pos 1 dan 2 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) sebesar 5%, sesuai Form E Nomor: E133108100071259 tanggal 27 Maret 2013 adalah seluruh bahan dasarnya dihasilkan di negara China dan diproduksi di negara China, dan oleh karena itu memenuhi ketentuan dalam Rule 3: Wholly Obtained Products, khususnya huruf j) angka 4;

bahwa bukti/dokumen pendukung Terbanding adalah sebagai berikut:

1. Surat Nomor: S-1913/KPU.01/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Confirmation on Certificate of Origin,
2. Certificate of Origin-ACFTA (Form E) Nomor: E133108100071259 tanggal 27 Maret 2013,
3. Surat Jawaban konfirmasi dari Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People's Republic of China Nomor: 201301086 tanggal 19 Agustus 2013.

bahwa bukti/dokumen pendukung Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-4977/KPU.01/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
2. SPTNP Nomor: SPTNP-006883/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 02 Mei 2013;
3. Surat Nomor: S-3877/KPU.01/Bd.02/3013 tanggal 16 September 2013;
4. SSPCP tanggal 09 September 2013 sebesar Rp83.940.000,00 (Keputusan dan SPTNP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank Mandiri tanggal 09 September 2013 sebesar Rp83.940.000,00;
6. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 132423/KPU.01/2013 tanggal 09 April 2013;
7. PIB Nomor: 134152 tanggal 09 April 2013 sebesar CIF USD153,273.60;
8. Bukti Penerimaan Negara The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd tanggal 05 April 2013 sebesar Rp250.814.000,00;
9. SSPCP tanggal 05 April 2013 sebesar Rp270.476.000,00 (PIB);
10. Bill of Lading Nomor: KMTCSHA3689957 tanggal 27 Maret 2013;
11. Invoice Nomor: 0080SE0122P41 tanggal 25 Maret 2013 sebesar USD153,273.60;
12. Packing List untuk Invoice Nomor: 0080SE0122P41 tanggal 25 Maret 2013;
13. Container Cleanliness Statement Voyage/Flight Number: KMTC KEELUNG 1303S tanggal 25 Maret 2013;
14. Marine Cargo Policy PT Sampo Japan Insurance Indonesia Nomor: JK-MCI-0003076-00000-2013-04 tanggal 27 Maret 2013;
15. Certificate of Origin-ACFTA (Form E) Nomor: E133108100071250 tanggal 27 Maret 2013,
16. Surat Keberatan Nomor: 004/2W/DN/12.06/2013 tanggal 14 Juni 2013,
17. Translation "Penjelasan Asal Produk".

bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*.

bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China*, dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule of Origin (ROO) Form E* atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area*.

bahwa berdasarkan Appendix 1: *Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area* pada Rule 7 dinyatakan "*The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:*

- a) *The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory,*
- b) *The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;*
- c) *The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence submitted,*
- d) *Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported,*
- e) *Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right.*

bahwa berdasarkan Annex 3: *Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area* pada Rule 3 dinyatakan "*Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:*

- a) *Plant and plant products harvested, picked or gathered there,*
- b) *Live animals 2 born and raised there,*
- c) *Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above,*
- d) *Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- e) *Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath the seabed.*
- f) *Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law,*
- g) *Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party,*
- h) *Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g) above,*
- i) *Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purposes, and*
- j) *Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a) to (i) above.*

bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan "Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini".

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan "Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tarif bea masuk dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (*Form E*) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan,
- Importir wajib mencantumkan Nomor referensi Surat Keterangan Asal (*Form E*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)*, pada pemberitahuan impor barang,
- Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (*Form E*) dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan,
- Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum".

bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan "Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696.

bahwa hasil pemeriksaan Majelis atas dokumen impor dan bukti/dokumen pendukung Pemohon Banding dan Terbanding, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah kriteria asal barang tersebut dalam *Form E* Nomor: E133108100071259 tanggal 27 Maret 2013 diragukan kebenarannya karena deskripsi produk pada kolom 7 atas barang impor *Aluminium Wheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)* bukanlah jenis barang yang menggunakan kriteria "WO/Wholly Obtained, sehingga ditetapkan oleh Terbanding dengan pembebanan tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 10%.

bahwa PIB Nomor: 134152 tanggal 09 April 2013, *Form E* Nomor: E133108100071259 tanggal 27 Maret 2013.

bahwa Terbanding menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk secara umum (MFN) dan menyatakan tidak mendapat preferensi tarif BM dalam skema AC-FTA karena deskripsi produk pada kolom 7 atas barang impor berupa *Aluminium Wheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)* bukanlah jenis barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kriteria "WO/Wholly Obtained, dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 10%.

bahwa Terbanding dengan surat Nomor: S-1913/KPU.01/2013 tanggal 13 Mei 2013 melakukan konfirmasi atas Form E Nomor: E133108100071259 tanggal 27 Maret 2013 kepada Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People's Republic of China.

bahwa Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People's Republic of China dengan surat Nomor: 201301086 tanggal 19 Agustus 2013 telah mengirimkan hasil konfirmasi atas surat Terbanding Nomor S-1913/KPU.01/2013 tanggal 13 Mei 2013, dan menyatakan bahwa Form E Nomor: E133108100071259 tanggal 27 Maret 2013 tersebut adalah sah dan benar, dan semua material yang digunakan dalam proses produksi seluruhnya diperoleh di China.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa *Aluminium Wheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 dan 2 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 134152 tanggal 09 April 2013, mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan tarif bea masuk sebesar 5%.

Menimbang

: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas barang impor berupa *Aluminium Wheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 dan 2 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 134152 tanggal 09 April 2013, mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa *Aluminium Wheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, negara asal China, Klasifikasi Pos 1 dan 2 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%.

Memperhatikan

: Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan

: Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4977/KPU.01/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-006883/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 02 Mei 2013, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupa *Aluminium Wheel of Motorcycle (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 dan 2 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 134152 tanggal 09 April 2013 mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH
Drs. Sunarto, MM
Usman Pasaribu, S.Sos.
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: Put.56120/PP/M.IXA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis Hakim berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan Panitera Pengganti, sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH

Drs. Sunarto, MM

Drs. Surendro Suprijadi, MM

Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Hakim Anggota,

sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Pemohon Banding, serta tidak dihadiri oleh Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)